



Kawal Infrastruktur, Komisi C DPRD Perkuat Sinergi Pusat-Daerah



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Memasuki tahun anggaran 2026, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur perkotaan yang dinamis dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah keterbatasan anggaran pasca efisiensi APBD, lembaga legislatif ini mendorong optimalisasi skema pendanaan pusat untuk menjaga momentum pembangunan di Kota Pelajar.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro (Fraksi Golkar), mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta saat ini berada dalam fase yang sangat dinamis. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan besar terkait kemampuan fiskal daerah.

"Kita harus realistis bahwa kemampuan APBD Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi di berbagai sektor. Namun, pembangunan tidak boleh berhenti. Strategi yang kita ambil adalah memperkuat lobi dan koordinasi agar proyek-proyek strategis bisa diakomodir melalui skema APBN," ujar Bambang.

Keberhasilan sinergi ini, menurut Bambang, sudah terlihat nyata pada revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Yogyakarta yang kini tampil lebih modern dan bersih berkat kucuran dana pusat, tanpa menguras kantong kas daerah secara berlebihan. Sebut saja Pasar Prawirotaman di Jalan Parangtritis, Pasar Terban maupun Gedung Pusat

Desain Industri Nasional yang lokasinya bersebelahan. Ketiga gedung tersebut merupakan aset milik Pemkot Yogya yang dibangun sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sejumlah infrastruktur lain juga dilakukan dengan mekanisme sama.

Salah satu agenda besar yang menjadi fokus perhatian Komisi C dalam waktu dekat adalah pembangunan ulang atau revitalisasi Jembatan Kewek. Jembatan legendaris yang melintasi jalur kereta api ini dinilai sudah dimakan usia dan memerlukan penanganan serius demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Bambang Seno menekankan bahwa Jembatan Kewek bukan sekadar infra-



Bambang Seno Baskoro
KR-Isimewa



Subagyo
KR-Isimewa



Eko Djoko Widiyatno
KR-Isimewa

struktur. Meski secara fisik pembangunan Jembatan Kewek ditangani oleh pusat melalui dana APBN, Komisi C mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk tidak berpangku tangan. Bambang menegaskan bahwa peran daerah tetap krusial dalam

Aspek yang tak kalah penting ialah sarana pendukung seperti penataan trotoar dan estetika di sekitar jembatan agar selaras dengan konsep heritage Kota Yogyakarta.

Sebagai mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

baik dari sisi regulasi maupun teknis di lapangan.

"Infrastruktur dan lingkungan hidup adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan fisik yang masif akan sia-sia jika persoalan sampah tidak terselesaikan. Itulah mengapa kami di Komisi C terus berkoordinasi intensif dengan DLH untuk memastikan ekosistem lingkungan kita tetap sehat," ujarnya.

Subagyo memberikan apresiasi terhadap program yang digulirkan Pemkot melalui gerakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Mengolah Sampah). Program ini dinilai sebagai langkah progresif untuk menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sampah dan Infrastruktur Harus Seiring

Selain fokus pada pembangunan jalan dan jembatan, penanganan masalah sampah menjadi prioritas

politis PDIP tersebut.

Senada, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Eko Djoko Widiyatno, mengatakan dalam kemitraannya dengan DLH, dirinya mendorong adanya penguatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Djoko menekankan beberapa poin penting yang menjadi fokus pengawasan devan. Salah satunya memastikan tempat pengolahan sampah di tingkat kemantren berfungsi maksimal. Kemudian mendorong DLH untuk tidak bosan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada bank sampah di tiap RW. Di samping itu juga memastikan alokasi anggaran lingkungan hidup tepat sasaran, terutama untuk pengadaan teknologi



Jajaran Komisi C ketika meninjau infrastruktur di wilayah.
KR-Ardhi Wahdan

struktur penghubung biasa, melainkan akses vital bagi pergerakan ekonomi dan pariwisata.

"Jembatan Kewek adalah pintu masuk utama wisatawan menuju kawasan Malioboro dari sisi utara. Kondisinya saat ini memang sudah memerlukan peremajaan total. Kami bersyukur proyek ini akhirnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat tahun ini," imbuhnya.

Daya Dukung Pemerintah Kota

memberikan daya dukung agar proyek tersebut sukses dan tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang merugikan.

Daya dukung yang dimaksud meliputi manajemen lalu lintas berupa rekayasa jalur selama masa pembangunan agar arus wisatawan ke Malioboro tidak lumpuh. Kemudian sosialisasi masyarakat guna memastikan warga dan pelaku usaha di sekitar proyek mendapatkan informasi yang jelas.

Permukiman (DPUPKP), Komisi C berjanji akan melakukan pengawasan ketat di lapangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan spesifikasi bangunan sesuai standar dan pengerjaan selesai tepat waktu.

"Fokus kami di 2026 adalah memastikan setiap rupiah, baik dari APBD maupun APBN, benar-benar berdampak pada kualitas hidup warga. Infrastruktur yang mantap adalah fondasi utama bagi pulihnya ekonomi pasca-



Jajaran Komisi C ketika meninjau proses pengolahan sampah.
KR-Ardhi Wahdan

krusial yang harus dikawal bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta sebagai mitra kerja strategis.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Subagyo, menyatakan bahwa wajah kota yang maju tidak hanya dilihat dari kemajuan infrastrukturnya, tetapi juga dari kebersihan dan kualitas lingkungannya. Menurutnya, aspek pengelolaan sampah saat ini memerlukan dukungan sistematis yang lebih kuat,

ningkatkan bahwa secanggih apa pun program yang dibuat oleh kepala daerah, keberhasilannya sangat bergantung pada hulu, yaitu masyarakat sebagai produsen sampah.

"Program Mas Jos ini sudah sangat bagus sebagai stimulan. Namun, kunci utamanya ada pada konsistensi. Masyarakat harus terus aktif dan memiliki komitmen tinggi untuk memilah serta mengolah sampah dari rumah tangga. Tanpa partisipasi aktif warga, program ini hanya akan menjadi slogan," tegas

pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Djoko berharap adanya sinergi yang lebih erat antara pembangunan fisik yang dikerjakan DPUPKP dengan aspek kebersihan yang dikelola DLH. "Kami ingin Yogyakarta tidak hanya dikenal karena Malioboro tetapi juga karena budaya bersih warganya. Komisi C akan terus mengawal agar kebijakan infrastruktur tahun 2026 ini selalu berwawasan lingkungan," pungkasnya. (Dhi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005